

PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL
DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN,
KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU HAKIM**



Diajukan oleh :

Samuel Yose Geogarth Tampubolon

NPM : 180513232

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL
DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN,
KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU HAKIM**



Diajukan oleh :

Samuel Yose Geogarth Tampubolon

NPM : 180513232

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDSIAL
DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN,
KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU HAKIM**



Diajukan oleh :

Samuel Yose Geogartha Tampubolon

NPM : 180513232

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara dan Pemerintahan

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 13 Desember 2021

Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum.



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL
DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN,
KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU HAKIM**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 Desember 2021

Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

Sekretaris Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Anggota Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat, dan pertolongannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim”**.

Pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah terlibat, membantu, mendukung, memberikan semangat, dan juga memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kelancaran penulisan hukum/skripsi ini. Penulis secara khusus ingin mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., PhD., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan senang hati, tulus, dan tidak lelah memberikan arahan, bimbingan, dan mendampingi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan motivasi kepada Penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan.
5. Seluruh Staff Administrasi, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium dan segenap Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak, Mama, dan Adek yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

7. Teman-teman terdekat selama kuliah yang membantu, menyemangati, menemani Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yaitu: Dicky, Christo, Nando, Glen, Obey, Jane, Elsa, Anna.
8. Senior-senior Penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang merupakan teman diskusi Penulis yang sedikit banyak telah membantu tidak hanya dalam penulisan skripsi ini melainkan dalam segala hal yang berkaitan dengan pengembangan akademis maupun non akademis Penulis yaitu: Bang Jonathan, Bang Daniel, Bang Yuda, Bang Rizki, Bang Vincent, Bang Winner.
9. Keluarga Besar PERMABA Yogyakarta, Rechtspraak Veritatis (RV), dan Komunitas Debat & Riset Mahasiswa, yang merupakan wadah berdinamika penulis selama masa kuliah.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenaan di dalam penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 9 November 2021

Penulis,

Samuel Yose Geogatha Tampubolon

ABSTRACT

The Judicial Commission is an institution formed in the reformed regime. The Judicial Commission has the authority to propose the appointment of Supreme Court justices and has other powers in the context of maintaining and upholding the honor, dignity, and behavior of judges as mandated by Article 24B paragraph (1) of the Constitution. This paper is entitled Juridical Review of the Authority of the Judicial Commission in Maintaining and Upholding the Honor, Noble Dignity, and Behavior of Judges. This paper analyzes, first, how the Judicial Commission has the authority to maintain the honor, dignity, and behavior of judges. Second, how the Judicial Commission authority to upholding the honor, dignity, and behavior of judges. This paper uses a normative legal research approach. The author concludes that first, the Judicial Commission's authority in maintaining the honor, dignity, and behavior of judges has been strengthened after the amendment. However, after changes are made, the indicators or criteria for judge behavior that must be maintained are clear, namely based on the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges. Second, the authority of the Judicial Commission in upholding the honor, nobility and behavior of judges after the issuance of the Law No 18 of 2011 as an amendment to Law No 22 of 2004 also appears to have been more comprehensive and further strengthens the authority of the Judicial Commissions in enforcing judges suspected of committing violations to the Code of Ethic and Code of Conduct for Judges. However, the decisions given by the Judicial Commission are not authoritative, meaning that the decisions given by the Judicial Commission are limited to providing recommendations or proposing to the Supreme Court to impose sanctions on judges who have been proven to have violated the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges.

Keywords: authority, Judicial Commission, maintaining, enforcing, code of ethics and behavioral guidelines for judges

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II PEMBAHASAN	16
A. KY dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945	16
1. Sejarah KY	16
2. Kedudukan KY dalam Kekuasaan Kehakiman	21
a. Kekuasaan Kehakiman	21
b. Kedudukan KY dalam Kekuasaan Kehakiman	23
B. Wewenang KY Menurut Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	24
1. Wewenang KY dalam Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung	25
2. Wewenang KY dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim	25

a. Wewenang KY dalam Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim	28
b. Wewenang KY dalam Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim	39
BAB III PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pelaksanaan Pemantauan Persidangan 2015 sd 2019	35
Tabel 2 Permohonan Pemantauan yang Diterima Tahun 2019	36
Tabel 3 Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2019	36
Tabel 4 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019	37
Tabel 5 Hasil Pemantauan yang Dihasilkan di Tahun 2019	38
Tabel 6 Klasifikasi Rekap Pelaksanaan Pemantauan Berdasarkan Provinsi	39
Tabel 7 Penerimaan Laporan Masyarakat dari tahun 2015 sd 2019	42
Tabel 8 Penerimaan Laporan Berdasarkan Media Penyampaian Periode 2 Januari sd 31 Desember 2019	43
Tabel 9 Penerimaan Laporan Berdasarkan Jenis Perkara Periode 2 Januari sd 31 Desember 2019	44
Tabel 10 Penerimaan Laporan Berdasarkan Badan Peradilan Periode 2 Januari sd 31 Desember 2019	44
Tabel 11 Penerimaan Laporan Berdasarkan Daerah Pengaduan Periode 2 Januari sd 31 Desember 2019	45
Tabel 12 Verifikasi Laporan	46
Tabel 13 Registrasi Laporan	47
Tabel 14 Analisis Laporan	48
Tabel 15 Pemeriksaan	49
Tabel 16 Rekapitulasi Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2019	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Penanganan Laporan Masyarakat	41
--	----



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil karya duplikasi ataupun plagiasi hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 November 2021

Samuel Yose Geogarth Tampubolon